



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD TAHUN 2024)
KECAMATAN LIMPUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Limpung Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Limpung Kabupaten batang ini disusun mendasari Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2023 tanggal Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan disahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, diharapkan Kecamatan Limpung sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).

Limpung, 22 Juli 2023



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Kerja	24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
	4.1. Program dan Kegiatan	28
BAB V	PENUTUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab).

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Limpung Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengioperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah. Dari Rencana Kerja (RENJA) kemudian dijadikan acuan sebagai penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Limpung dan kemudian selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Limpung.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Kepmendagri 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023– 2026;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

1.3.2 Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Limpung Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Limpung tahun 2023 dan realisasi Renstra Kecamatan Limpung mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Limpung berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Limpung, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Limpung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Limpung.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan garis besar mengenai program dan kegiatan dan pendanaan terkait terlaksananya program dan kegiatan di tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2022 Kecamatan Limpung melaksanakan 4 program, 9 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 97,80 %. Sedangkan

tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,67%. Hampir semua kegiatan memenuhi target 100%.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan usulan sebesar terurai dalam 4 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Limpung sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Limpung masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Limpung dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

Tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Limpung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Nomenklatur sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Th 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan							
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Th 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Th 2020		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Th 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
7	01			KECAMATAN																		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	100	%	48	%	100	%	97	%	97	%	100	%	97	%	97	%	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, outcome : Meningkatkan kelancaran kinerja ASN	6	th	3	th	1	th	1	th	100	%	1	th	5	th	83	%

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	output : Tersediannya Honorarium Pengelolaan Keuangan SKPD,outcome : Meningkatkan kelancaran kinerja pengelolaan keuangan	60	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	48	bln	83	%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanan kantor	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	output : Terciptanya keamanan kantor outcome : meningkatkan keamanan kantor kecamatan	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	output : Tersediannya Honorarium Pengurus barang SKPD,outcome : Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya kelengkapan penerangan gedung kantor, outcome : meningkatkan penerangan bangunan kantor dan keamanan kantor	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	output : Tersedianya alat-alat tulis kantor, outcome : meningkatkan kelancaran administrasi kantor	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, outcome : meningkatkan kelancaran administrasi kantor	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	output : Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/koran), outcome : Meningkatkan wawasan dan pengetahuan	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	80	%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	output : Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, outcome : Meningkatkan kelayakan makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	80	%
						output : Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi. Outcome : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	80	%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	100	%	50	%	100	%	83	%	83	%	100	%	81	%	81	%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat/ benda pos; outcome : tercapainya kelancaran dalam hal surat menyurat	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Outcome : Terpenuhinya sarana telepon, air dan listrik	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	output: Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor, outcome : meningkatnya kebersihan kantor	72	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	60	bln	83	%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor	100	%	50	%	100	%	83	%	83	%	100	%	81	%	81	%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	output : Terlaksananya perawatan rutin kendaraan dinas/operasional, outcome : Perbaikan dan perawatan kendaraan dinas guna kelancaran dan keamanan mobilitas aparatur	36	unit	12	unit	6	unit	6	unit	100	%	6	unit	24	unit	80	%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	output : Terlaksananya perawatan perlengkapan gedung kantor, outcome : Meningkatkan kelancaran kinerja	6	th	2	th	1	th	1	th	100	%	1	th	5	th	83	%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan, outcome : Meningkatkan kelayakan dan kenyamanan kantor	6	th	2	th	1	th	1	th	100	%	1	th	4	th	83	%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	output : terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan outcome : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan tepat guna	6	kegiatan	3	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	%	1	kegiatan	5	kegiatan	80	%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	83	%	83	%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	output : terlaksananya pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan outcome : Meningkatnya peranan perempuan di perdesaan	6	kegiatan	3	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	%	1	kegiatan	5	kegiatan	80	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Limpung mengalami peningkatan. Ada 3 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Limpung Tahun 2022 :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 2. Jumlah kasus pencurian
- 3. Jumlah keluarga prasejahtera

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Limpung tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Limpung meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.2 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-3	Tahun n-3	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)			78	80	83	86	81	83	86	87	
2	Jumlah kasus pencurian			11	10	8	7	8	8	7	7	
3	Jumlah keluarga prasejahtera			3500	2700	2300	1900	2400	2100	1900	1900	

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang menjadi Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Limpung adalah sebagai berikut:

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Camat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program & Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
- 3. Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- 6. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Limpung mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- 1) Perijinan;

2) Rekomendasi;

3) Koordinasi;

4) Pembinaan;

5) Pengawasan
- 6) Fasilitasi;

7) Penetapan;

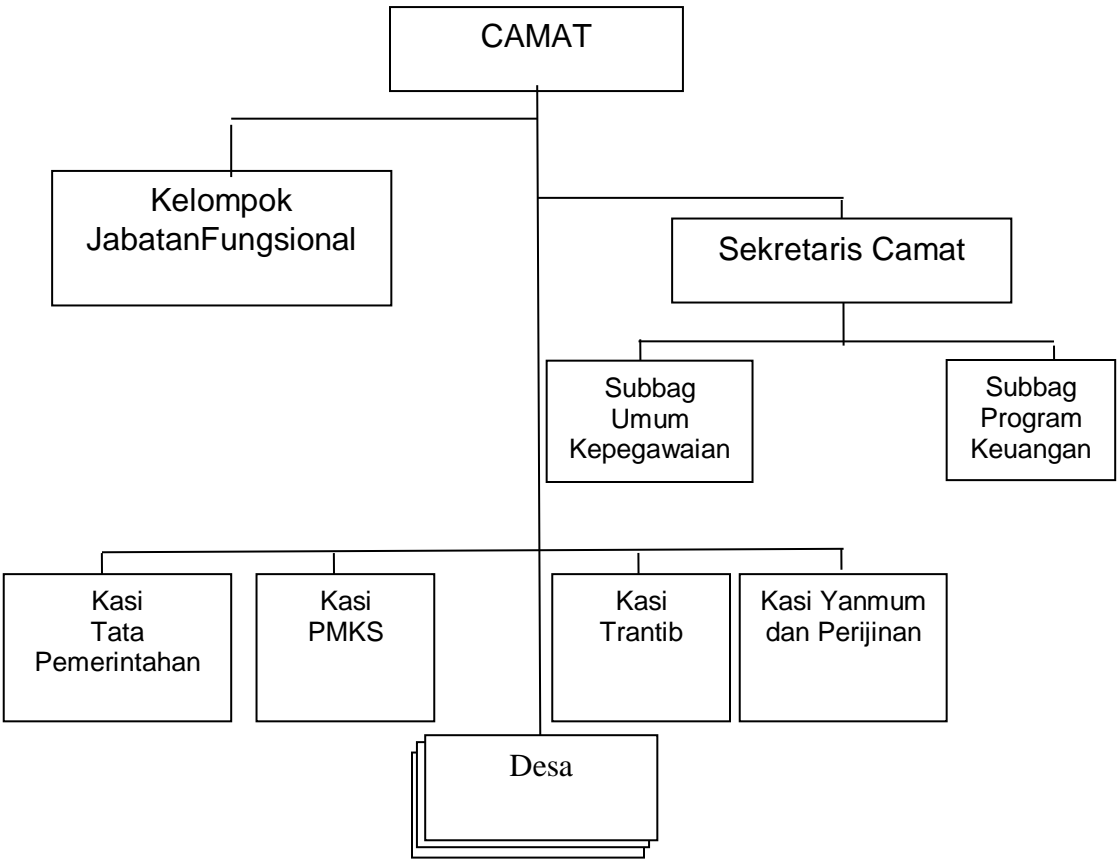
8) Penyelenggaraan;

9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban um um;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang



Sumber : Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
 - b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
 - b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD, P3BK);
 - d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga;
 - h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
 - i. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan Terpadu
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
 - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;

- b. Masih banyaknya tawuran dan perkelahian antar warga;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam antisipasi dini bencana;
- d. Kurangnya perhatian terhadap Hansip Desa-desanya yang memadai;

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN pemerintah kecamatan dan desa dengan pelaksanaan diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjlP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkandiklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Batang tahun 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan perturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Berdasarkan hasil review yang dilakukan terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pagu indikatif program/kegiatan yang berubah, perubahan tersebut disebabkan adanya pengurangan output yang implikasinya tidak terlalu signifikan terhadap pencapaian program, maupun pengurangan output karena kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya;
- b. Terdapat kegiatan baru yang sebelumnya tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, disebabkan karena adanya amanat regulasi dari pusat.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2024 selengkapnya di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 (TC-31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Batang

OPD : Kecamatan Limpung

No	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN				2.070.021.510	KECAMATAN				2.070.021.510	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase capaian kinerja Perangkat daerah yang mencapai target	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase capaian kinerja Perangkat daerah yang mencapai target	100 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Limpung	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1.479.330.799	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Limpung	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1.479.330.799	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Limpung	Terbayarnya Honor Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	22.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Limpung	Terbayarnya Honor Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	22.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Limpung	Terbayarnya Honor Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	22.800.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Limpung	Terbayarnya Honor Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	22.800.000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Limpung	Terbayarnya Honor Petugas Pegurus/Penyimpan Barang	12 Bulan	4.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Limpung	Terbayarnya Honor Petugas Pegurus/Penyimpan Barang	12 Bulan	4.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Limpung	Tersedianya pakaian Dinas Pegawai	15 stel	7.090.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Limpung	Tersedianya pakaian Dinas Pegawai	15 stel	7.090.000	
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Limpung	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Limpung	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Limpung	tersedianya alat listrik	12 Bulan	5.539.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Limpung	tersedianya alat listrik	12 Bulan	5.539.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Limpung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	80.169.100,0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Limpung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	80.169.100,0	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Limpung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	17.091.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Limpung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	17.091.000	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Limpung	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	9.678.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Limpung	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	9.678.600	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Limpung	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	2.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Limpung	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	2.100.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Limpung	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	21991500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Limpung	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	21991500	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Limpung	Terlaksananya Bimtek penata usahaan Arsip Dinamis di SKPD	1 kegiatan	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Limpung	Terlaksananya Bimtek penata usahaan Arsip Dinamis di SKPD	1 kegiatan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
14	Pengadaan Personal Computer	Kec. Limpung	Tersedianya Personal Computer	1 Paket	19.389.000	Pengadaan Personal Computer	Kec. Limpung	Tersedianya Personal Computer	1 Paket	19.389.000	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Limpung	Tercukupinya Bahan untuk Kegiatan Kantor	12 Bulan	3.375.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Limpung	Tercukupinya Bahan untuk Kegiatan Kantor	12 Bulan	3.375.000	

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Limpung	Tercukupinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	19.254.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Limpung	Tercukupinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	19.254.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Limpung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	60.834.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Limpung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	60.834.320	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Limpung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	38.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Limpung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	38.450.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Limpung	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	2.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Limpung	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	2.500.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Limpung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	233.540.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Limpung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	233.540.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN LIMPUNG)	Kec. Limpung	Servis komputer, printer, laptop dan perlegkapan lainnya	12 Bulan	2.590.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN LIMPUNG)	Kec. Limpung	Servis komputer, printer, laptop dan perlegkapan lainnya	12 Bulan	2.590.300	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Terpenuhinya kebutuhan musrenbang tingkat kecamatan			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Terpenuhinya kebutuhan musrenbang tingkat kecamatan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limpung	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limpung	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan			
22	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Limpung	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	18.177.400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Limpung	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	18.177.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tersedianya Dana, Terselenggaranya Pelatihan Perempuan di pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif		5.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tersedianya Dana, Terselenggaranya Pelatihan Perempuan di pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi		5.000.000	

								Produktif			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan			
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Limpung	Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	1 kegiatan	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Limpung	Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	1 kegiatan	5.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		jumlah persentasi aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		jumlah persentasi aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limpung				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limpung				
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Limpung	Tersedianya BinteK pengelola keuangan dan pendayagunaan Aset desa	1 kegiatan	13.812.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Limpung	Tersedianya BinteK pengelola keuangan dan pendayagunaan Aset desa	1 kegiatan	13.812.500	
					2.070.021.510					2.070.021.510	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan 2024, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah/lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kecamatan Limpung dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Limpung

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Limpungyang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Limpungtidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingansehingga tidak ada usulan yang masuk ke Renja Kecamatan LimpungTahun 2024. Semua usulan diakomodir langsung oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi dan fungsinya

Tabel 2.5 (TC-32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Kabupaten Batang sejak Tahun 2021 mengamanatkan prinsip dasar dalam penyusunan APBD adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- f. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- g. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap, Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah.

Beberapa langkah yang ditempuh sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Batang, maka diperlukan langkah - langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi berbagai pungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyesuaian tariff pajak dan penyesuaian dasar npengenaan pajak tertentu;
- d. Peningkjian kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/ wajib pajak;
- e. Membangun system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- f. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan seta profesionalisme SDM Aparatur;
- g. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil bukan pajak;
- h. Optimsalilai danm pemberdayaan asset daerah;
- i. Meningkatkan kualitas manajemen asset daerah;
- j. Otimalisasi Badan usaha Milik Daerah;
- k. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan;

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban. Khusus pada bagian ini, diarahkan pada pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Batang untuk kondisi tahun anggaran 2017-2022.

Analisis tentang Pendapatan Daerah tidak hanya sekedar melakukan analisis atas perkembangan yang dicapai, namun juga bagaimana pengelolaannya. Hal demikian perlu dilakukan karena pertumbuhan yang rendah dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi berupa manajemen atau pengelolaan Pendapatan Daerah. Hasil pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022. Perkembangan-perkembangan yang dicapai mencerminkan kemajuan atas kinerja dan keberhasilan dalam mengoperasionalkan kebijakan yang sudah ditetapkan selengkapny di jelaskan sebagai berikut :

bahwa kondisi Pendapatan Daerah dalam kategori tinggi dengan capaian realisasi 79,57% atau tidak tercapai sebesar Rp 448.424.557.820,- Kondisi ini di sebabkan karena target pendapatan asli daerah hanya tercapai 83,23%. Atau tidak tercapai sebesar Rp 60.647.616.636,-. Bahkan komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki capaian yang sangat rendah di akhir periode RPJMD. Capaiannya hanya 0,20% atau tidak tecapai sebesar Rp 497.492.751.442,- Satu-satunya komponen pendapatan daerah yang mencapai taeket pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan. Dana perimbangan hingga akhir periode RPJMD tercapai 108,22 (kategori Sangat Tinggi). Dengan kata lain, Dana Perimbangan mampu tercapai melebihi target sebesar Rp109.715.810.259,-.

Jika komponen pendapatan daerah hanya tergantung pada dana perimbangan, analisisnya dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap pihak lain: Analisis dapat menyoroti tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak lain, terutama pemerintah pusat. Jika dana perimbangan merupakan sumber utamapendapatan, hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan dan alokasi dana dari pemerintah pusat.
2. Ketidakpastian pendapatan: Daerah yang hanya mengandalkan dana perimbangan memiliki risiko yang tinggi terhadap fluktuasi kebijakan pemerintah pusat. Jika kebijakan perimbangan berubah atau dana dikurangi, pendapatan daerah dapat terpengaruh secara signifikan. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap stabilitas dan keberlanjutan pendapatan daerah dalam jangka panjang.
3. Keterbatasan pengelolaan keuangan daerah: Ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dapat mengurangi insentif bagi daerah untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Analisis dapat mengevaluasi kapasitas daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada.
4. Potensi diversifikasi pendapatan: Analisis juga dapat mencakup penilaian terhadap potensi daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan memperkuat kemandirian keuangan.
5. Keberlanjutan keuangan daerah: Dalam jangka panjang, daerah perlu memastikan keberlanjutan keuangan mereka. Analisis dapat melibatkan penilaian terhadap langkah-langkah yang dapat diambil oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti pengembangan sumber daya lokal, peningkatan investasi, atau upaya lain untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan

Rencana Kerja Kecamatan Limpung Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limpung Tahun 2024 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan prioritas sebagai berikut :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Limpung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun rencana kerja Kecamatan Limpung yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Dalam upaya mencapai tersebut dapat dikatakan tidak ada kendala yang berarti dalam arti kebijakan, program dan kegiatan sebagai cara untuk mencapai tujuan berjalan dengan lancar.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limpung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun adalah :

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kemandirian Desa;

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan ukuran tingkat pencapaian sasaran dengan memperhitungkan Indikator Masukan (Input), Indikator Keluaran (Output), Indikator Hasil (Outcome), Manfaat (Benefits) dan Dampak (Impacts) yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pengukuran pencapaian Indikator sasaran pada Kecamatan Limpung, dari seluruh kelompok indikator sasaran dapat diidentifikasi sampai dengan indikator hasil (Outcome)

Hasil pengukuran indikator sasaran yang hendak diwujudkan dalam 4 (empat) tahun mendatang adalah ;

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
3. Meningkatnya jumlah Desa maju dan mandiri di kecamatan
4. Meningkatnya koordinasi trantibum serta penyelenggaraan pemerintahan umum.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Limpung adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

Tabel 3.2 (Tabel T-C26)
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Skpd	61	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pengelola Adminstrasi	Nilai SAKIP SKPD	64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
								5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

								10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Presentase Layanan di SKPD Yang sesuai SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	84%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								12 Pengadaan Mebel
								13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								15 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
								16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
								18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
--	--	--	--	--	--	--	---	---

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Meningkatnya koordinasi trantibum serta penyelenggaraan pemerintahan umum	Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan
								5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3	Meningkatkan Kemandirian Desa	Presentase Jumlah Desa Maju dan Mandiri diKecamatan	35%	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri diKecamatan	Jumlah Desa Maju dan Mandiri diKecamatan tiap Tahun	23 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
--	--	--	--	--	--	--	---	--

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Limpung tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Terpenuhinya gaji PNS dan TPP bagi pegawai Kecamatan Limpung

Target Capaian Kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp 1.089.176.741,-

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Terbayarnya honorarium tenaga administrasi

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp.,-

c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp 22.500.000,-

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja : Terpenuhinya honor penjaga malam

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 22.800.000,-

b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja : Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah

Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.800.000,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Kinerja : Tersedianya PDH Keku lengkap
Target Capaian Kinerja : 14 stel
Kebutuhan Dana : Rp. 7.090.000,-
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan di bidang cukai
Target Capaian Kinerja : 1 kegiatan
Kebutuhan Dana : Rp. 0,-
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja : Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Target Capaian Kinerja : 1 kegiatan
Kebutuhan Dana : Rp. 27.000.000,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 5.539.000,-
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya alat tulis kantor dan pengisian toner
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 80.169.100,-
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya makanan dan minuman rapat serta minuman harian pegawai
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 17.091.000,-
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja : Tersedianya penjiwaan, cetak mmt dan fotocopi
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 9.678.600,-
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja : Tersedianya koran suara merdeka
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 2.100.000,-
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD

Indikator Kinerja : Tersedianya uang harian & transport perjalanan dinas
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 21.991.500,-

g) "Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Kinerja :
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Tersedianya kendaraan dinas roda dua
Target Capaian Kinerja : 2 unit
Kebutuhan Dana : Rp. 0,-

b) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Indikator Kinerja : Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
Target Capaian Kinerja : 1 paket
Kebutuhan Dana : Rp. 21.991.500,-

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja : Tersedianya materai 10.000
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 3.375.000,-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Terbayarnya rekening listrik dan telepon
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 19.254.000,-

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 60.834.320,-

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Terpenuhinya perpanjangan STNK, suku cadang dan BBM kend. dinas/operasional
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 38.450.000,-

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Indikator Kinerja | : | |
| Target Capaian Kinerja | : | 1 tahun |
| Kebutuhan Dana | : | Rp. 2.500.000,- |
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja | : | Tersedianya pemeliharaan/rehab gedung kantor |
| Target Capaian Kinerja | : | 1 paket |
| Kebutuhan Dana | : | Rp 190.000.000,- |
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Indikator Kinerja | : | Tersedianya pemeliharaan PC, printer, AC dan CCTV |
| Target Capaian Kinerja | : | 1 tahun |
| Kebutuhan Dana | : | Rp. 2.590.300,- |

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja | : | Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan |
| Target Capaian Kinerja | : | 1 kegiatan |
| Kebutuhan Dana | : | Rp. 18.177.400,- |

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| Indikator Kinerja | : | Terlaksanya Rakon dan Pelatihan PKK |
| Target Capaian Kinerja | : | 1 kegiatan |
| Kebutuhan Dana | : | Rp. 5.000.000,- |

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

10. Fasilitasi,RekomendasiKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) "Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| Indikator Kinerja | : | |
| Target Capaian Kinerja | : | 1 kegiatan |
| Kebutuhan Dana | : | Rp. 13.812.500,- |

Tabel 4 (TC-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Batang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	Kec Limpung	100%	1.657.367.461	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	2.130.987.219
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kec Limpung	100%		Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	Kec Limpung	1 tahun	1.089.176.741	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	1.479.086.999
01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium tenaga administrasi	Kec Limpung	12 Bulan	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	-
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kec Limpung	12 Bulan	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	22.500.000
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanan kantor	Kec Limpung	100%	27.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	27.600.000
01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya honorarium penjaga malam	Kec Limpung	12 Bulan	22.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	22.800.000

01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	Kec Limpung	12 Bulan	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	4.800.000
Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase kelayakan pegawai	Kec Limpung	100%	34.090.000	DBHCT		100%	34.090.000
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya PDH Kegy	Kec Limpung	14 stel	7.090.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 stel	7.090.000
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Kec Limpung	1 keg	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	27.000.000
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	Kec Limpung	100%	145.940.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	145.940.700
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	Kec Limpung	12 Bulan	5.539.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	5.539.000
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kec Limpung	12 Bulan	59.793.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	59.793.100
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	Kec Limpung	12 bulan	17.091.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	17.091.000

01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	Kec Limpung	1 tahun	9.678.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	9.678.600
Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya koran suara merdeka	Kec Limpung	12 Bulan	2.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	2.100.000
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanan dinas	Kec Limpung	1 tahun	21.991.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	21.991.500
01	2.06	10	"Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kec Limpung	1 tahun	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	5.000.000
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	Kec Limpung	100%	19.389.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	19.389.000
01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan roda dua	Kec Limpung	2 unit	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 unit	-
01	2.07	05	Pengadaan Personal Computer	Tersedianya mebel kantor	Kec Limpung	1 paket	27.172.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 paket	27.172.000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	Kec Limpung	100%	83.409.320	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	83.409.320
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai 10.000	Kec Limpung	12 bulan	3.375.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	3.375.000

01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik dan telepon	Kec Limpung	12 bulan	19.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	19.200.000
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	Kec Limpung	12 bulan	60.834.320	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	60.834.320
Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor	Kec Limpung	100%		Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	Kec Limpung	1 tahun	38.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	38.450.000
01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kec Limpung	1 tahun	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	2.500.000
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	Kec Limpung	1 paket	190.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	190.000.000
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan komputer, printer, AC dan CCTV	Kec Limpung	1 tahun	2.590.300	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	2.590.300

02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Kec Limpung	100%	18.177.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	18.177.400
02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Kec Limpung	100%	18.177.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	18.177.400
21	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya musrenbang tk. Kecamatan	Kec Limpung	1 keg	18.177.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	18.177.400
Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec Limpung	100%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000	100%	5.000.000
03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	Kec Limpung	100%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000	100%	5.000.000
03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	terlaksananya rakon dan pelatihan PKK	Kec Limpung	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000	1 keg	5.000.000
06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Limpung	100%	13.812.500	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.812.500	100%	33.719.500

	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kec Limpung	100%	13.812.500	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.812.500	100%	15.011.000
	2.01	03	"Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kec Limpung	1 keg	13.812.500	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.812.500	1 keg	18.708.500
			JUMLAH				1.657.367.461				2.130.987.219

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024.

❖ **Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Limpung Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

❖ **Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Limpung, 22 Juli 2023



